

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah :

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu wujud dari instrumen demokrasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang demokratis. Melalui sistem ini , semua warga memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan memiliki kebebasan dalam memilih calon kepala daerah. Pilkada diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 serta sebagai wujud nyata hak politik masyarakat yang terealisasikan. Dalam dunia perpolitikan Pilkada sering disebut sebagai bagian dari pesta demokrasi lokal, karena pada momen tersebut masyarakat menentukan kontestan yang akan menjadi penyambung lidah masyarakat dalam level daerah.

Data yang dilansir dari *Berisatu.com* menyebutkan bahwa pada pilkada serentak pada tahun 2020 diikuti sebanyak 741 Paslon, jumlah itu terdiri dari Paslon yang maju dari Partai Politik (Parpol) sebanyak 671 terdiri atas 15 Paslon Cagub dan 647 Paslon Pilbup dan Pilwalkot. Sementara pasangan calon yang diusung partai politik dan sisanya yakni 69 pasangan calon perseorangan/independen, serta 15 calon tunggal maju di Kabupaten/ Kota (Roberth Wardhy, 2020).

Dari data tersebut kita bisa melihat semangat dan antusias masyarakat untuk menjadi kepala daerah sangatlah besar, seiring dengan proses dan serangkaian hingga keterpilihan kepala daerah juga turut memanas. Berbagai cara dilakukan oleh elit politik demi memperoleh jabatan kekuasaan tentunya strategi yang harus dipilih diharuskan untuk memperhatikan beberapa hal seperti profil calon kepala daerah, program dan kinerja, serta kemampuan yang dimiliki calon itu sendiri. Dalam ranah perpolitikan, strategi digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, masyarakat dapat mempertimbangkan sosok yang akan berkompetisi dalam arena Pilkada berdasarkan penilaian individu, terdapat tiga unsur yakni popularitas, citra dan dukungan internal (Peter Schröder, 2010)

Pertama, tingkat popularitas, dimana tim pemenang ataupun partai politik harus memperhatikan sejauh mana calon tersebut dikenal oleh masyarakat, hal ini nantinya akan menunjukkan semakin tinggi tingkat popularitas calon maka akan semakin mudah diterima oleh masyarakat. *Kedua*, citra atau persona. Setiap calon yang ingin maju dalam kontestasi Pilkada dibutuhkan citra atau persona yang positif untuk dapat ditunjukkan kepada masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran karakter calon pemimpin mereka, dan mempermudah proses penilaian oleh masyarakat. *Ketiga*, terdapat dukungan secara internal. Bentuk dukungan tersebut diantaranya dapat berasal dari partai politik atau dari organisasi yang diikuti oleh calon kepala daerah.

Dukungan internal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana calon mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat maupun golongan dan lingkungan sekitar. Kontestasi Pilkada di Indonesia, seringkali digunakan sebagai ajang elit lokal untuk memanfaatkan demokrasi electoral demi mengamankan jabatan strategis eksekutif maupun legislatif tingkat lokal kepada keluarga, kerabat, krooni, dan loyalis mereka. Beberapa kelompok atau “klan politik” berhasil menjadikan Kabupaten/ Kota atau Provinsi sebagai daerah kekuasaan dan bertujuan untuk menjauhkan desentralisasi dengan demokrasi. Hal ini dikarenakan desentralisasi memiliki potensi dalam menghasilkan partisipasi aktif dari warga lokal dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaannya. Dengan begitu, memberikan kekhawatiran terhadap munculnya raja-raja kecil di setiap daerah yang diiringi meluasnya elit-elit penguasa, gejala ini sering disebut dengan neo patrimonialistik dimana raja-raja kecil tersebut mulai memperluas arena kekuasaan politiknya melalui keluarga dan kerabatnya.

Sehingga, momen Pilkada ini justru dimanfaatkan oleh beberapa pihak dengan menempatkan anggota keluarganya melalui nama besar keluarga dalam tataran pemerintahan untuk melanjutkan kuasa politik keluarga. Hal ini menjadi bukti bahwa Pilkada sangat ramah dengan pejabat yang memiliki nama besar dan kapital yang besar, dalam tatanan empiris dalam pencalonan kepala daerah, modalitas setiap calon akan berbeda satu sama lain. Namun, pasangan calon yang akan mencalonkan diri seringkali harus memiliki tiga basis yang biasa digunakan untuk

mencalonkan diri dalam Pilkada maupun Pemilu. *Pertama*, selama berkuasa, memiliki investasi politik dalam bentuk pemerintahan yang baik (Haboddin, 2017) . Hadirnya modal investasi politik dari suami, istri, anak menjadikan senjata dalam Pilkada. Hal ini sering digunakan sebagai slogan yang untuk mendapatkan empati public melalui pengalaman-pengalaman yang sudah terbukti dilaksanakan di daerah tersebut, sehingga slogan tersebut dapat menjadi instrumen efektif dalam menarik perhatian pemilih. *Kedua* jaringan kekuasaan yang meliputi jaringan formal seperti partai politik dan birokrasi sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan kekuasaan di daerah, dalam konteks ini kepala daerah memiliki komunikasi politik yang baik antar partai politik dan birokrasi . Karena itu, ketika mereka maju pada pemilihan yang kedua semua partai politik dirangkul dalam koalisi yang besar. *Ketiga*, kekayaan sebagai kekuatan dalam upaya membeli partai politik (mahar politik) maupun dalam membeli suara pemilih.

Seringkali tiga basis material tersebut digunakan untuk mempertahankan kekuasaan politik oleh lingkaran keluarga. Kemampuan para keluarga petahana dalam mengoperasionalkan tiga basis material secara baik , maka akan memudahkan sepak terjang kandidat/calon yang berasal dari keluarga tersebut. Bukan hanya itu, struktur dan jabatan keluarga menjadi kesempatan dalam mempertahankan pola yang sudah dibentuk dan menguatnya patronase politik.

Seperti halnya yang terjadi di Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 yang diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Ipuk Fiestiandani dengan pasangan Sugirah melawan petahana wakil bupati yaitu Yusuf Widyatmoko yang berpasangan dengan KH. Muhammad Riza Azizy (Gus Riza).

Pencalonan pasangan Ipuk dan Sugirah diusung oleh koalisi 5 partai politik dengan total perolehan kursi DPRD Banyuwangi sebanyak 18 kursi, yakni meliputi Partai Nasdem 5 kursi, PDI-Perjuangan 11 kursi, Hanura 1 kursi, Gerindra 5 kursi, dan PPP 4 kursi. Sedangkan pasangan Yusuf - Gus Riza diusung oleh koalisi 4 partai politik dengan total perolehan kursi DPRD sebanyak 11 kursi, yakni Partai Demokrat 6 kursi, PKB 9 kursi, PKS 1 kursi dan Golkar 5 kursi. Yusuf dalam Pilkada 2020 ini berpasangan dengan Gus Riza, yang berasal dari keluarga besar Ponpes Darussalam Blokagung yang berpengaruh di Kabupaten Banyuwangi (Husdinariyanto, 2020).

Dengan demikian modalitas pasangan Yusuf-Gus Reza ini juga kuat dalam kontestasi *head to head* dengan pasangan Ipuk-Sugirah. Status Ipuk sebagai istri petahana menjadi modalitas kuat, tingginya tingkat popularitas figur pemimpin hanya pada bupati, sebagai orang pertama. Sementara wakil bupati sangat jarang terliput, ini sebagaimana maraknya pemberitaan media atas sukses Kabupaten Banyuwangi yang dilekatkan dengan kepemimpinan Azwar Anas (Buhori, 2014)

Fenomena Pilkada Kabupaten Banyuwangi menjadi contoh nyata hubungan yang diperoleh Ipuk Fiestiandani sebagai istri dari Bupati Abdullah Azwar Anas menunjukkan kerangka kuasa politik dalam

lingkaran keluarga, pewarisan kekuasaan yang diperoleh Ipuk memberikan keuntungan dalam beberapa sisi, baik relasi partai politik maupun relasi dengan birokrasi. Tidak jarang bahkan menganggap pola seperti ini adalah sebuah kewajiban, pasalnya kinerja anas menjadi tolak ukur dalam melanjutkan estafet pemerintahan kepada Ipuk. Hal ini menunjukkan bahwa interelasi telah diikat oleh kepentingan terlebih pada kepentingan kekuasaan berkaitan hasil kinerja untuk menyempurnakan program - program yang belum selesai, yang pada akhirnya mendorong untuk dilanjutkan kembali roda pemerintahan oleh keluarga Anas.

Disamping itu, Anas telah lebih awal membangun relasi politik dengan berbagai organisasi kemasyarakatan selama ia berkuasa dalam dua dekade. Secara akumulatif, kemudian Ipuk memiliki investasi secara politik lebih apabila dibandingkan dengan lawan. Sejalan dengan pembahasan diatas, Wasisto Rahardjo dalam (Djati, 2015) mengatakan ” Pilkada saat ini justru menjadi tren dalam mewariskan kekuasaan kepada kerabat untuk mempertahankan kekuasaan dan menyembunyikan rasa malu politik. Dengan begitu akan membentuk sebuah sistem dinasti politik di wilayah tersebut.

Dinasti Politik mengandalkan kekuatan kerabat, dan hubungan genetic yang menempatkan elit di atas masyarakat. Hal ini juga menjadi jalan pintas untuk menjamin keberadaan rezim politik tertentu. (Harjanto, 2011). Terlepas dari kontroversi yang menyertainya Ipuk Fiestiandani dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, dimana peran Ipuk tidak sekedar mengandalkan nama besar keluarga namun kualitas dan kapabilitas personal menjadi salah satu kunci dalam memperebutkan kekuasaan. Keberadaan sebagai istri bupati mampu memberikan ruang

Ipuk untuk tampil dan mengambil peran untuk dapat dijadikan modal dalam berlaga di Pilkada Kabupaten Banyuwangi. Berbagai organisasi yang sudah pernah digagas oleh Ipuk setidaknya dapat membantu untuk memperebutkan hati pemilih, melalui nama Anas di belakangnya. Artinya tidak selamanya praktek politik mempunyai dampak yang destruktif. Dalam kaitan ini semua bergantung dari moralitas yang menerima kekuasaan dalam menjalankan kewenangannya. Konsep politik dinasti erat kaitannya dengan patronase dengan mengandalkan hubungan kekerabatan. Kondisi ini tentunya akan menjadi penting untuk dibahas hubungan kekeluargaan dan kekerabatan atau disebut dengan patronase sering dikatakan sebagai ancaman bagi demokrasi, melalui data yang dihimpun lembaga riset Power, Welfare and Democracy (PWD) db kerjasama UGM dan Universitas Oslo, Pilkada yang diselenggarakan di 18 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2013, menunjukkan bahwa Indonesia berada dibawah cengkraman patronase (Madung, 2016).

Namun , perlu diketahui bahwa patronae tidak selamanya memberikan konotasi yang negatif yang dirasa akan menghambat tokoh-tokoh baru dalam perpolitikan daerah, namun gambaran secara positif pemilik kekuasaan harus generasi yang memang berkompeten dan mumpuni dalam memimpin daerah, maka yang terjadi adalah sistem perpolitikan dinasti akan sangat membantu dalam pengasingan suatu grup atau kelompok. Selain itu, figur yang tampil sebagai calon kepala daerah juga lebih dikenal dengan masyarakat dan sudah menjalani pendidikan politik dalam keluarganya sehingga memiliki rekam jejak politik yang panjang sesuai dengan perjalanan keluarganya (David Ganda Silalahi, 2015)

Pola hubungan patronase dan politik dinasti bukan hanya soal etis atau tidak etis, baik atau tidak baik, suka atau tidak suka melainkan apakah politisi dinasti memiliki kapasitas, kapabilitas dan aksesibilitas jika suatu saat dipercaya menjadi pemimpin (Melky Jakhin Pangemanan, 2018). Dengan demikian, hubungan patronase bukanlah menjadi sebuah pandangan yang buruk dalam tatanan pemerintahan. Kondisi ini memang cukup mengkhawatirkan, bukan hanya karena keluarga ikut menggantikan namun eksese negatif dari hasrat berkuasa yang menimbulkan persoalan di ruang publik. sehingga perlunya modalitas

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia hubungan yang berlandaskan kekeluargaan ini justru menimbulkan efek negatif, namun tidak selamanya hubungan tersebut bersifat buruk, beberapa daerah di indonesia juga menggunakan praktik politik dinasti, dengan efek positif, dengan memperhatikan tokoh-tokoh yang berlaga adalah seseorang yang berkompeten, kredibel dan memiliki pengalaman organisasi sebagai bukti bahwa orang tersebut mewarisi trah politik yang dimiliki keluarga, belum tentu peran mereka hanya memenuhi hasrat politik keluarga.

Namun kualitas dan kemampuan politik kandidat sangat diperlukan dalam perebutan jabatan strategis. Faktor lain juga mempengaruhi kemenangan seperti dukungan moril ataupun materil dari elit-elit tertentu yang kemudian membentuk kekuatan baru dalam perpolitikan yang ada. Sejatinya ada beberapa hal yang menjadi penyebab bertahanya politik keluarga dalam level daerah salah satunya batasan dua periode yang sudah dijalankan oleh petahana. Sehingga seringkali keluarga petahana masih ingin memanfaatkan momen ini dengan

mengajukan anak menantu, suami, istri, atau adik, sebagai alternatif dalam melanjutkan estafet kepemimpinan melalui figur dan kepercayaan yang sudah dibangun. Selain itu majunya calon dari keluarga petahana akan memungkinkan strategi dalam mengurangi jumlah pasangan calon, hal ini dikarenakan lawan akan semakin terhimpit dengan keberadaan keluarga petahana yang maju dalam kontestasi Pilkada. Dengan begitu, calon lebih mudah melakukan mobilisasi pilkada demi mempertahankan panggung politiknya .

1.2. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran Anas dalam keterpilihan Ipuk pada Pilkada Kabupaten banyuwangi Tahun 2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian :

1. Menjelaskan peran Anas dalam keterpilihan Ipuk pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

1.4. Manfaat Penelitian :

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan *insight* baru tentang keluarga petahana yang kemunculannya tidak selalu bersifat buruk atau negatif bagi demokrasi. Serta penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan untuk memperluas kajian tentang faktor keterpilihan kepala daerah di tingkat lokal. Penelitian ini juga mampu menjadi sumbang ilmu bagi mahasiswa serta penemuan dan pemikiran yang baru sehingga mampu mahasiswa mampu mengkritisi dan memberikan pengetahuan dan wawasan. Mereka akan menggunakannya untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan secara pribadi dan status sosial yang lebih tinggi untuk mengendalikan konsentrasi yang besar mengenai sumber daya material

yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan secara pribadi dalam posisi sosial yang eksklusif. Gelanggang ini semakin menonjol dalam Pilkada dan memberikan peluang untuk tumbuh suburnya patronase politik di tingkat lokal.

1.5.Tinjauan Pustaka :

1.5.1. Kajian Literatur

Kuatnya dominasi elit dalam pilkada akan memudahkan aktor-aktor politik daerah dalam melanggengkan kekuasaan. Hal tersebut dikarenakan banyak beberapa calon yang memiliki hubungan kekerabatan dan kedekatan dengan elit politik sebelumnya. Patronase sering dikaitkan dengan konsep oligarki kekuasaan, Robert Michels (Herri Jenius Nge, 2018) juga melihat bahwa oligarki mempunyai kecenderungan dalam membangun ikatan keluarga dalam tubuh partai politik. Ikatan kekeluargaan ini bahkan dibawa ke dalam sistem pemerintahan, sehingga tidak jarang jika dalam sistem pemerintahan lebih banyak elit politik keluarga yang berkuasa.

Oligarki sering didefinisikan sebagai kekayaan material yang terkonsentrasi berdasarkan harta atau kekayaan (Winters, 2011). Mereka akan menggunakannya untuk mempertahankan dan meningkatkan status sosial yang lebih tinggi untuk mengendalikan konsentrasi yang besar mengenai sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan secara pribadi dalam posisi sosial yang eksklusif. Gelanggang ini semakin menonjol dalam Pilkada dan memberikan peluang untuk tumbuh suburnya patronase politik di tingkat lokal.

Studi mengenai patronase bukanlah hal yang baru, dengan menggunakan teori patronase (Haboddin, 2017) menyoroti bagaimana cara kerja praktik politik kekerabatan dalam praktek demokrasi melalui Pilkada langsung. Kemudian (Susanti, 2018) melihat bahwa keberadaan dinasti politik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara besar serta mengancam fase transisi demokrasi. Sedangkan (Bimantara, 2018) mencermati praktik dinasti politik di Kabupaten Kediri yang sudah berjalan selama belasan tahun sekaligus memandang dinasti politik akan terus berkembang seiring tidak adanya peraturan sistem demokrasi yang nantinya akan menjadi ancaman demokrasi. Meskipun demikian ketiga penelitian terlalu menitikberatkan pada pandangan patronase atau politik keluarga sebagai sebuah pandangan yang bersifat negatif bagi demokrasi. Stigma dan kekhawatiran dalam memonopoli kekuasaan dan pelanggaran norma serta etika dalam masyarakat cenderung dilihat secara negatif dan buruk.

1.6.Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka Pemikiran Teoritis merupakan landasan yang digunakan peneliti untuk menghubungkan hasil dan data yang sudah diperoleh. Teori menjadi landasan awal untuk memahami realita yang akan dikaji dalam penelitian .

1.6.1. Patronase

Menurut Scott, patronase merupakan sebuah kasus khusus dari ikatan (dua orang) yang bersifat dikotomis dan hirarkis, antara “yang lebih tinggi” (patron) dan “yang lebih rendah” (klien). Scott mengungkapkan bahwa interaksi patron klien, melibatkan

hubungan persahabatan yang instrumental dimana seorang individu yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi dan menggunakan pengaruhnya untuk memberikan perlindungan dan keuntungan kepada seseorang yang memiliki status yang lebih rendah (Scott, 1972) .

Patron berperan sebagai orang dengan posisinya mampu membantu klien- kliennya. Secara ideal hubungan seperti ini di Indonesia biasa digunakan sebagai hubungan “bapak-anak buah”, dengan membangun sebuah keluarga yang besar (*extended family*). Kemudian, pihak Bapak harus siap dalam menyebarluaskan pengaruhnya (tanggung jawab) dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak ideologis dan tidak politis. Pada tahap selanjutnya, biasanya klien merespon dengan cara menawarkan dukungan secara umum kepada pihak patron. Salah satu tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang sering dikenal dengan “patronase” (*patronage*).

Patronase diartikan secara luas adalah pemberian bantuan, dukungan, keistimewaan, atau bantuan keuangan dari suatu organisasi atau individu kepada organisasi atau individu yang lainnya (Kausar & Zaman, 2011) . Selain itu definisi patroanse dilihat sebagai sebuah “ *all acts of patronage serviceable, but it is obviously not the only possibility*”, dimaksudkan patronase membutuhkan disposisi sumberdaya dimana uang dan ekonomi adalah yang utama, namun bukan satu-satunya kemungkinan, masih terdapat sumber- sumber lain yang mempengaruhi patronase

(Junior, 2014).

Teori Patronase Edward Aspinall menjelaskan patroanse adalah sebuah konsep untuk menangkap sebuah peristiwa yang berkaitan dengan distribusi keuntungan antara kedua belah pihak yang memiliki keuntungan kepentingan . Terdapat hubungan interaksi antara dua arah antara patron klien , dimana patron memiliki peran lebih tinggi dalam mengambil sebuah keputusan untuk menentukan sesuatu dan dapat memerintah dengan kekuasaan yang dimiliki, dan pihak klien adalah orang yang berada dibawah kekuasaan nya

Eksistensi dari patronase kemungkinan besar didasari dengan semakin menguatnya ketergantungan antara elit politik yang bertujuan dalam dalam menunjang keberhasilan. Vedi Hadiz dalam (Keller, 1984) berpendapat bahwa desentralisasi di Indonesia membuka jalan bagi kebangkitan dan konsolidasi (oligarki lokal). Subyek tersebut menunjukkan bertahnya warisan Orde baru yang kuat yang mengontrol kekuasaan negara dan diiringi dengan tidak terorganisir gerakan sosial dalam desentralisasi di Indonesia.

1.6.2. Kemunculan Patronase Politik

Pemahaman Kemunculan Patronase Politik dikutip melalui (Zulkieflimansyah, 2015) disebabkan beberapa hal : *Pertama*, terdapat keinginan dalam diri maupun keluarga untuk memegang kekuasaan. *Kedua*, terdapat kelompok yang terorganisir karena adanya kesepakatan dan kebersamaan dengan

keluarga kandidat. Dalam kelompok sehingga terbentuk pemimpin kelompok dan pengikut kelompok. *Ketiga*, adanya kerjasama antara pemimpin dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. *Keempat*, adanya pembagian kerja antara kekuatan politik dan kekuatan modal sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan korupsi. Keinginan dari keluarga atau pemegang kekuasaan untuk melanggengkan karir politiknya sebagai bentuk penguasaan sumberdaya sering terjadi. Pengalokasian sumber daya public yang dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan teknis dan kapasitas melainkan melalui jaringan patronase.

Salah satu faktor penyebab timbulnya patronase dalam proses demokrasi di Indonesia ialah belum berkembangnya ruang public etis sebagai jantung demokrasi. Di samping patronase bertujuan untuk mengekalkan praktik-praktik korupsi, patronase juga dianggap menjadi tantangan demokrasi. Data yang dihimpun oleh lembaga riset Power, *Welfare and Democracy* (PWD) db kerjasama UGM dan Universitas Oslo, yang diselenggarakan di 18 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2013, menunjukkan bahwa Indonesia berada dibawah cengkraman patronase. (Madung, 2016). Dalam kerangka patron-klien , politisi memiliki kekuatan dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya kepada pemilih dan pengusaha melalui hubungan pribadi dan subyektif, bukan melalui aturan yang objektif pada umumnya, adil dan terbuka. Oleh karena itu, sebagai imbalan, pemilih memberikan dukungan politik, dan pengusaha memberikan

dukungan finansial kepada politisi (Widoyoko, 2018) .

Dengan demikian, petahana mengerahkan kekuatan, kekuasaan dan akses dana besar yang dimilikinya untuk mempengaruhi dan memobilisasi rakyat, melalui himbauan partisipasi maupun mobilisasi. Maka bukan hal yang aneh jika di berbagai pilkada, para petahana mampu mempertahankan kekuasaannya.

Dan dengan kekuatan pengaruhnya itu pula, para kepala daerah petahana mampu memenangkan Pilkada. Oleh karena itu tidaklah salah, apabila dikatakan bahwa klausul dua kali masa jabatan itu lah yang sebenarnya menjadi biang keladi berkembangnya embrio dinasti politik di daerah (Khozanah Hidayati, 2010). Namun hal itu memang sah secara prosedural (Gamawan Fauzi, 2010). Akibatnya, hampir tidak ada figur lain dari berbagai entitas politik yang mampu menyaingi tingkat popularitas seorang kepala daerah. Ini, seperti juga telah dikemukakan di atas, tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik baik dalam pemilihan umum maupun pada pemilihan kepala daerah. Sehingga untuk masa setelah sepuluh tahun karena dalam posisi masih memegang kekuasaan dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi tidak berhak lagi untuk mencalonkan diri yang ketiga kalinya, maka demi mempertahankan eksistensinya di lingkaran kekuasaan, para petahana mencari putra mahkota´ di lingkaran dalam keluarga (Budi Prianto, 2016)

Agenda politik dinasti, dipraktekan dengan penyesuaian-penyesuaian melalui mekanisme dan prosedur yang modern . Sehingga mereka tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan regenerasi dan kaderisasi. Bahkan, upaya untuk membangun politik dinasti disesuaikan dengan prosedur demokrasi, meskipun pada hakikatnya tidak sesuai dengan substansi demokrasi.

1.6.2.1. Patronase Politik

Politik selalu erat kaitanya dengan kekuasaan dan penguasa. Dengan demikian, seseorang akan saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan secara bersama melalui suatu mekanisme politik untuk memperoleh, mempengaruhi dan mendistribusikan kekuasaan. Namun sayangnya, hubungan politik dalam pencapaian suatu kekuasaan tersebut justru menjadi patron klien dalam politik. Menjelang pilkada, akan banyak aktor-aktor yang menyediakan dukungan elektoralnya bagi para politisi melalui sistem kekerabatan maupun kekeluargaan yang sering disebut dengan hubungan patronase.

Pengertian Patronase oleh Sheffter (Sukmajati, 2013) adalah sebuah pembagian keuntungan di antara para politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada para pemilih. Patronase juga dipahami dalam arti luas , akan tetapi tetap pada suatu inti yaitu pembagian keuntungan dari dua belah pihak yang diberi dan yang memberi. Pembagian keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan ekonomi politik. Patronase juga beriringan

dengan klientalistik dengan melihat apa yang sedang dipertukarkan antara pihak patron, broker dan klien. Konsep patronase sering dikaji dalam pemilihan umum dalam skala besar seperti halnya dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, ataupun pemilihan presiden karena berkaitan dengan kendaraan partai politik sebagai pendukung pemerintah.

Beberapa situasi tidak dapat dihindari, keadaan sumber daya manusia yang rendah akan membuat orang berfikir cepat menjadi seorang pemimpin tanpa memikirkan tanggung jawab sebagai pemimpin kepada rakyatnya. Dimensi transisi dari otoritarianisme ke dalam demokrasi ditandai dengan kebijakan otonomi dan desentralisasi, hal ini sudah banyak dimanfaatkan oleh kedua kelompok elit untuk memperoleh kekuasaan secara penuh di daerah, mereka bersaing untuk menjadi pemenang dan bersinergi yang disatukan dalam ikatan perkawinan (Effendi, 2018).

Selain itu, patronase juga dapat diwujudkan dengan mengunci posisi penting dalam pemerintahan oleh orang-orang terdekatnya. Upaya ini dilakukan untuk mengefektifkan kekuasaan elit tunggal yang jumlahnya sedikit, sehingga melalui cara ini pertahanan kekuasaan efektif dilakukan kembali oleh elit lokal. Selain itu makna dari elit pluralis lebih dinamis daripada makna elit tunggal dinilai sangat statis. Elit pluralis didefinisikan sebagai jaringan-jaringan antar elit dalam kerangka pembagian kekuasaan yang berkaitan dengan ekonomi politik. (Haryanto, 2005).

Perwujudan demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya adanya keterbukaan dan ruang untuk berpartisipasi secara aktif bagi seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam memperebutkan jabatan- jabatan politik mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Namun pada akhirnya masih terkendala dengan status dan hak-hak sosialnya akibat dari fenomena patronase dan *political dynasty*. Jika demokrasi didefinisikan sebagai kekuasaan politik. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka politik dinasti juga menciptakan pragmatisme politik dengan cara mendorong kerabat atau keluarga untuk menjadi pemimpin atau Kepala Daerah (Susanti, 2018). Patronase pemilih terikat hubungan ketergantungan dengan patron. Hal tersebut kemudian akan memicu kalangan kerabat menjadi elit sebagai kunci pemahaman dinasti dalam praktek pemerintahan lokal atau demokrasi lokal.

Oligarki membawa dampak yang cukup signifikan dalam demokrasi, pasalnya mekanisme kandidasi tidak berjalan dengan semestinya adanya kecenderungan pencalonan Kepala Daerah yang berlandaskan kedekatan dan kekerabatan dengan petahana maupun dengan partai politik, dengan tujuan melanjutkan sistem pemerintahan dari pemimpin sebelumnya, hal ini tentu terkait dengan kinerja dan program sehingga mampu mendorong kalangan keluarga atau orang dekat untuk menggantikan petahana, sehingga

akan dikhawatirkan melalui patronase tersebut akan membangun jejaring dinasti politik.

1.6.3. Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal

Sejalan dengan konsep di atas, transformasi politik yang tengah berjalan di Indonesia digunakan oleh petahana atau Kepala Daerah dengan cara menggunakan kedudukanya untuk memainkan peran sebagai pemilik sumber daya utama. Pola hubungan patron-klien ini justru bertentangan dengan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan. (Leo Agustino, 2009)

Menurut Joseph Schumpeter, Demokrasi adalah pemerintahan dimana rakyat memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk menolak para politisi yang memerintah (Schumpeter, 2017) . Dalam pandangan schumpeter ini yang sering dikenal dengan demokrasi prosedural , yang menyiratkan perlunya arena terbuka berdasarkan prinsip kesetaraan dalam proses seleksi kepemimpinan. Schumpeter juga menambahkan perlunya persaingan yang sehat dan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum maupun Pilkada (Huntington, 1976).

Schumpeter mengatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah adanya mekanisme kompetitif dalam Pemilihan pemimpin melalui kontestasi untuk memperebutkan suara rakyat. Seperti halnya aktor politik yang berlaga di tingkat lokal untuk mendapatkan suara rakyat secara penuh bahkan sebagai upaya

untuk melanggengkan kepentingannya (dinasti politik) , ia juga menjelaskan bahwa wujud dari demokrasi adalah Pemilu maupun Pilkada. Demokrasi menurut (Landman, 2018) adalah sebuah popular kontrol terhadap urusan publik dan politik yang berbasis persamaan hak kewarganegaraan. Beetham menekankan ke popular kontrol dimana dalam hal ini fungsi popular kontrol dapat mengembalikan hak-hak politik yang dimiliki warga negara dan sebagai penentu bekerjanya demokrasi.

Demokrasi memberikan akses yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh akses yang setara untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Demokrasi menurut Beethamian menjelaskan bahwa demokrasi merupakan kontrol popular persamaan politik, pengelolaan kesejahteraan dipahami sebagai isu yang tunduk pada kontrol popular dan persamaan politik. Artinya demokrasi adalah kontrol politik yang mengutamakan persamaan politik, dengan cara mengembalikan hak-hak politik sebagai warga negara maupun masyarakat. Pada bagian lain control dan partisipasi politik warga negara sudah menjadi syarat utama dalam terciptanya sistem demokrasi yang sesungguhnya. (Cahyono, 2012). Secara pemahaman demokrasi adalah kesempatan sama, namun dalam hal ini patronase menghapus kesempatan sama tersebut.

1.6.4. Patronase dalam Konotasi Positif Demokrasi

Pencapaian kemenangan ini merupakan potret dari adanya kemampuan mereka dalam menaklukkan dan merawat kekuasaan di tingkat lokal yang tak lain menutup celah masyarakat untuk memilih pemimpin dengan cara kompetitif. Penelitian Besley dan Querol (Besley & Reynal-Querol, 2013) membuktikan bahwa dinasti akan berakhir dengan sendirinya manakala kinerja ekonomi (penguasaan sumber-sumber ekonomi) dari kepemimpinan dinasti itu buruk. Ini menunjukkan pula fakta, bahwa warga hanya akan menerima kepemimpinan dinasti manakala kinerja ekonominya bagus. Temuan ini secara tidak langsung mengatakan, bahwa dinasti politik itu tidak selalu memiliki citra buruk di mata warga negara .

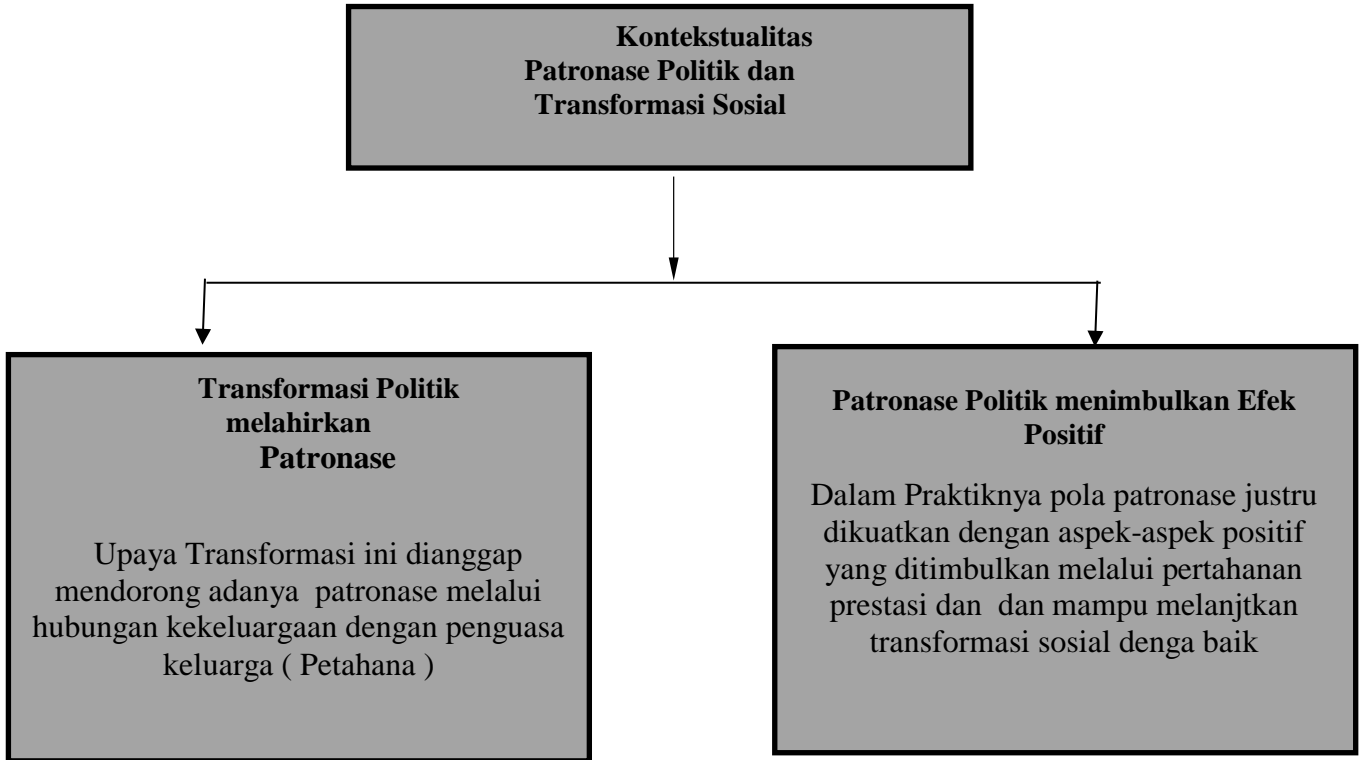
Kondisi ini menunjukkan hubungan patronase dalam praktiknya konsep patronase tidak selalu bersifat buruk bagi demokrasi , hanya karena beberapa contoh di beberapa daerah praktik patronase membawa keburukan, namun terdapat beberapa daerah yang justru mempunyai nilai positif dari hubungan patronase ini. Kontradiksi dan ambiguitas akan peran patronase dalam demokrasi telah menjadi sumber perpecahan dan konflik, khususnya antara patronase dan demokrasi. Namun, hubungan ini bukan menjadi satu satunya keburukan dalam demokrasi, melalui hubungan ini terdapat jaringan politik, investasi politik dan modalitas yang diterima dan diperoleh calon atau kandidat yang berasal dari keluarga.

Mohtar Mas' oed dan Collin Mac Andrews dalam bukunya “ Perbandingan Sistem Politik “ , sudah lama membahas betapa kuatnya pengaruh politik keluarga dalam pembentukan politik seseorang. Melalui pandangan kedua penulis tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki kontribusi besar dalam struktur sosialisasi politik . Oleh karena itu, keluarga mampu membentuk sikap politik, interaksi politik, serta memungkinkan untuk berpartisipasi aktif dalam politik (Mas' oed Mohtar, MacAndrews, 2008) menjelaskan bahwa kemunculan patronase adanya konsep penguasaan secara ekonomi melalui interaksi politik berdasarkan kekerabatan, namun penguasaan ekonomi bukan menjadi basis utama munculnya patronase politik, fenomena patronase politik tidak hanya terkait dengan penguasaan ekonomi semata , namun dari hasil transformasi sosial atau berkaitan dengan hasil kinerja untuk menyempurnakan program – program yang belum selesai, yang pada akhirnya mendorong untuk dilanjutkan kembali roda pemerintahan, dengan didukung prestasi- prestasi dalam memberikan referensi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya .

1.7. Kerangka Berpikir

Bagan 1.1.

Kerangka Berpikir



1.8.Operasionalisasi Konsep

Dimensi-dimensi yang digunakan untuk menjelaskan konsep penelitian, dalam penelitian ini meliputi:

1. Patronase Politik ialah penguasaan yang tidak setara yang memiliki satu inti dimana didalamnya mencakup pendistribusian keuntungan, dan penguasaan sumberdaya ekonomi . Konsep patronase sering dikaji melalui Pemilihan kepala daerah dengan melibatkan kerabat ataupun sanak keluarga dalam Pilkada .
2. Patronase politik juga menjelaskan bahwa adanya hubungan yang telah diikat oleh kepentingan terlebih pada kepentingan penguasaan ekonomi, namun patronase politik bukan hanya terkait dengan penguasaan ekonomi semata , namun dari hasil transformasi sosial

- atau berkaitan hasil kinerja untuk menyempurnakan program – program yang belum selesai, yang pada akhirnya mendorong untuk dilanjutkan kembali roda pemerintahan oleh keturunan petahana.
3. Adanya keinginan untuk melanjutkan transformasi kembali yang didorong dengan patronase melalui jalur kekerabatan atau keluarga yang diturunkan melalui adik, anak, istri. Upaya ini dianggap mampu mengancam demokrasi, dengan berbagai kekhawatiran terjadinya ketidakadilan dalam distribusi kekuatan politik sehingga mengancam ketidaksempurnaan demokrasi di tingkat lokal.
 4. Hubungan patronase tidak selalu bersifat buruk, hubungan tersebut bisa menjadi hubungan yang positif diiringi dengan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas dan kepercayaan dalam memimpin.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan dan mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan (Creswell, 2014) menyebutnya bahwa metode penelitian melibatkan berbagai macam teknik pengumpulan analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya.

Metode penelitian oleh Creswell dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix methods (campuran kualitatif dan kuantitatif)

1.9.1. Desain Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah Mix Method, yaitu suatu langkah penelitian yang menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell strategi ini merupakan strategi yang digunakan peneliti untuk menghubungkan data yang ditemukan dari satu metode ke metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan melalui interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu diikuti dengan data kuantitatif. Penelitian ini menggambarkan dan mengeksplorasi tentang sumber penguasaan lain yang mempengaruhi keterpilihan Ipuk Fiestiandani dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

1.9.2. Situs Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, karena diterapkannya lokasi dan situs penelitian maka tujuan dan objek sasaran penelitian ditetapkan sehingga peneliti akan dimudahkan untuk meneliti secara detail dari sebuah kasus yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Banyuwangi.

1.9.3. Informan Penelitian

Creswell dalam Raco mengungkapkan subjek penelitian atau informan merupakan seseorang yang memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Raco, 2020) . Kualitas informasi dan fakta- fakta yang didapat di lapangan bergantung pada pemilihan informan. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan memilih informan sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Subyek Penelitian dibagi menjadi dua yaitu Kelompok Informan Kualitatif dan Kelompok Informan Kuantitatif yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh penulis :

Tabel 1.1

Identitas Responden

No.	Informan Penelitian	Informasi Yang Dibutuhkan
1.	Ipuk Fiestiandani (Bupati Terpilih)	Informasi Keterpilihan Ipuk dalam Pilkada 2020 dan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi untuk maju atau mencalonkan diri dalam Pilkada 2020,serta nilai yang ingin dicapai.
1.	I Made Cahyana Negara Ketua Partai Demokrasi Indonesia Indonesia Perjuangan (PDIP)	Informasi mengenai alasan yang melatarbelakangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memunculkan nama Ipuk sebagai calon kandidat Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

3.	Muhammad Basir Khadim Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Informasi mengenai alasan yang melatarbelakangi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendukung Ipuk sebagai calon kandidat Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
4.	Supriyadi Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Informasi mengenai alasan yang melatarbelakangi Partai Nasional Demokrat (NASDEM) untuk mendukung Ipuk sebagai calon kandidat Bupati Kabupaten Banyuwangi

5.	Maftuha Kiswah Wakil Ketua Partai Hanura	Informasi mengenai alasan yang melatarbelakangi Partai Hanura untuk mendukung Ipuk sebagai calon kandidat Bupati Kabupaten Banyuwangi
6.	Naufal Badri Ketua Partai Gerindra	Informasi mengenai alasan yang melatarbelakangi Partai Gerindra untuk mendukung Ipuk sebagai calon kandidat Bupati Kabupaten Banyuwangi
7.	Khoirul Falah Ketua Aliansi Partai Non Parlemen Banyuwangi (APNPB)	Informasi mengenai alasan yang melatarbelakangi Partai pendukung non parlemen (APNPB) untuk berkoalisi dengan partai pengusung dan mendukung Ipuk-Sugirah sebagai calon kandidat Bupati Kabupaten Banyuwangi
8.	I Made Cahyana Negara Ketua Tim Pemenangan Ipuk- Sugirah	Informasi mengenai strategi kemenangan Ipuk-Sugirah pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
9.	Indah Catur Cahyaningtyas Tim Pemenangan Ipuk- Sugirah dari Sisi Perempuan	Informasi mengenai faktor dan alasan yang mempengaruhi pendukung perempuan mendukung pasangan Ipuk dan Sugirah, serta nilai dan bentuk representasi perempuan yang dibangun dalam tatanan pemerintahan
10.	Nur Ali Mansyur Tim Teknisi Penggerak Relawan Ipuk-Sugirah	Informasi mengenai keterlibatan tim dan alur koordinasi secara teknis dalam Pemenangan Ipuk-Sugirah

1.9.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dari penelitian ini adalah jumlah persentase perolehan suara Ipek Fiestiandani-Sugirah dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu yang terbatas maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Sampel digunakan untuk mempermudah pengambilan data karena populasi yang begitu besar dan dinilai mampu menjadi perwakilan dari populasi. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik multistage sampling. Multistage sampling digunakan untuk survey berskala besar. Multistage sampling merupakan proses pengambilan sampel yang dilakukan melalui dua tahap pengambilan sampel atau lebih. Multistage random sampling pada dasarnya merupakan gabungan antara sampel stratifikasi (*stratified random sampling*) dengan sampling kluster (*cluster sampling*) Stratifikasi digunakan agar heterogenitas dari populasi dapat tercermin dalam sampel. Untuk menanggulangi masalah biaya yang meningkat karena stratifikasi tersebut, maka stratifikasi

dikombinasikan dengan cluster (Warde et al., 1987). Pengambilan sampel dengan *multistage cluster sampling* tidak jauh berbeda dengan pengambilan sampel dengan metode *cluster sampling*. Metode *cluster sampling* dilakukan secara langsung ke cluster yang langsung mencakup semua elemen *cluster* untuk dikumpulkan datanya. Sedangkan pada metode *multistage cluster sampling* terdapat perluasan dalam penarikan sampelnya, yaitu tidak langsung dilakukan penarikan sampel pada elemen tetapi melalui *cluster* terlebih dahulu. Pada tahap pertama pemilihan *cluster* dapat menggunakan *simple random sampling*, *systematic sampling* atau *stratified sampling*. Setelah *cluster sample* diperoleh, elemen pada *cluster* tersebut belum tentu digunakan dalam penelitian.

Tahap kedua adalah memilih sampel dari elemen-elemen pada tiap cluster, yang dapat diperoleh melalui penggunaan salah satu dari ketiga jenis teknik random yang sudah disebutkan sebelumnya. Pada tahap metode *multistage cluster sampling*, unit sampling yang dipilih pada tahap pertama disebut unit sampling primer (PSU), sedangkan unit sampling yang dipilih pada penarikan sampel tahap kedua disebut unit sampling sekunder dan seterusnya (Hansen, M.H., 1953). Dalam penelitian ini, unit cluster adalah 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahap I, dari 25 Kecamatan tersebut diambil 3 Kecamatan dengan teknik *stratified sampling* yaitu dipilih berdasarkan kualifikasi perolehan suara tertinggi, sedang, dan terendah di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.2
Presentase Perolehan Suara Ipuk-Sugirah Pilkada Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2020

No	Kecamatan	Persentase Perolehan Suara Ipuk Fiestiandani- Sugirah
1	Bangorejo	59.04 %
1.	Banyuwangi	41.71 %
3.	Blimbingsari	54.07 %
4.	Cluring	51.58 %
5.	Gambiran	58.79 %
6.	Genteng	53.38 %
7.	Giri	43.55 %
8.	Glagah	46.41 %
9.	Glenmore	54.01 %
10.	Kabat	46.76 %
11.	Kalibaru	53.90 %
12.	Kalipuro	41.16 %
13.	Licin	51.93 %
14.	Muncar	55.31 %
15	Pesanggaran	46.74 %
16.	Purwoharjo	54.34 %
17.	Rogojampi	51.17 %
18.	Sempu	58.68 %
19.	Siliragung	63.54 %
20.	Singojuruh	54.71 %
21.	Songgon	53.46 %
22.	Srono	56.35 %
23.	Tegaldlimo	51.30 %
24.	Tegalsari	65.91%
25.	Wongsorejo	39.04 %
	Jumlah	51.46 %

Sumber : KPU Kabupaten Banyuwangi 2020

Berdasarkan Tabel diatas, tiga Kecamatan terpilih adalah Kecamatan Tegalsari sebagai Kecamatan dengan suara tertinggi, Songgon sebagai Kecamatan dengan suara sedang, dan Wongsorejo sebagai Kecamatan dengan suara terendah. Kemudian pada tahap II dilakukan pengambilan sampel secara acak untuk memilih sampel Kelurahan, jumlah unit sampel ditentukan dengan

rumus berikut:

$$n'' = n \times deff$$

$$n_o = z^2 \frac{p \cdot q}{d^2}$$

$$n = \frac{n_o}{1 + \left(\frac{n_o}{N}\right)}$$

$$V = \left(\frac{d}{z}\right)^2$$

$$deff = \frac{V}{\left(\frac{p \cdot q}{n}\right)}$$

Keterangan:

n'' = sampel untuk tahap kedua (*two stage cluster*)

n = sampel untuk unit

primer n_o = sampel

asumsi

d = *sampling error* (10%)

z = koefisien kepercayaan (*Coefficient of Confidence*)
90% (1,64)

p & q = parameter proporsi binomial (50% : 50%)

$$n_o = \frac{1,64^2}{(0,1)^2} \cdot (0,50)(0,50)$$

$$= \frac{1,689}{0,01} \times 0,15$$

$$= \frac{0,6714}{0,01}$$

$$= 67,14 = \text{dibulatkan } 68$$

$$V = \left(\frac{0,1}{1,64}\right)^2$$

$$= 0,0037$$

a. Kecamatan Tegalsari (N=6)

$$n = \frac{68}{1 + \left(\frac{68}{6}\right)}$$

$$= 5,5 = \text{dibulatkan } 6$$

$$deff = \frac{0,0037}{\left(\frac{0,50 \times 0,50}{6}\right)}$$

$$= 0,088$$

$$n'' = 6 \times 0,088$$

$$= 0,518 = \text{dibulatkan } 1$$

$$deff = \text{design effect (1)}$$

$$N = \text{populasi unit primer}$$

a. Kelurahan Parangharjo (N=9)

$$n = \frac{68}{1 + \left(\frac{68}{9}\right)}$$

$$= 7,94 = \text{dibulatkan } 8$$

$$n''' = 8 \times 0,118$$

$$= 0,944 = \text{dibulatkan } 1$$

$$deff = \frac{0,0037}{\frac{(0,50 \times 0,50)}{8}}$$

$$= 0,118$$

b. Kelurahan Alasrejo (N=14)

$$n = \frac{68}{1 + \left(\frac{68}{14}\right)}$$

$$= 11,6 = \text{dibulatkan } 11$$

$$n''' = 11 \times 0,177$$

$$= 1,947 = \text{dibulatkan } 3$$

$$deff = \frac{0,0037}{\frac{(0,50 \times 0,50)}{11}}$$

$$= 0,177$$

c. Kelurahan Bengkak (N=14)

$$n = \frac{68}{1 + \left(\frac{68}{14}\right)}$$

$$= 11,6 = \text{dibulatkan } 11$$

$$n''' = 11 \times 0,177$$

$$= 1,947 = \text{dibulatkan } 3$$

$$deff = \frac{0,0037}{\frac{(0,50 \times 0,50)}{11}}$$

$$= 0,177$$

Berdasarkan perhitungan di atas terpilih unit sampel yaitu satu kelurahan dari Kecamatan Tegalsari, satu Kelurahan dari Kecamatan Songgon, dan dua Kelurahan dari Kecamatan Wongsorejo. Kemudian dilakukan acak sederhana untuk

menentukan kelurahan dari tiap kecamatan menggunakan aplikasi *Excel* dengan rumus *VLOOKUP*, sehingga terpilih Kelurahan Dasri, Parangharjo, Alasrejo, dan Bengkak. Pada tahap tahap III dilakukan pengambilan sampel secara acak untuk memilih unit sampel TPS, jumlah unit sampel ditentukan dengan rumus yang dijabarkan oleh (Purnomo, 2017) seperti di atas:

$$\begin{aligned}
 n_0 &= \frac{1}{(0,1)^1} \frac{(0,50)(0,50)}{(1,64)} \\
 &= \frac{1,689 \times 0,15}{0,01} \\
 &= \frac{0,6714}{0,01} \\
 &= 67,14 = \text{dibulatkan } 68
 \end{aligned}
 \quad \left| \quad
 \begin{aligned}
 V &= \left(\frac{0,1}{1,64} \right)^1 \\
 &= 0,0037
 \end{aligned}$$

d. Kelurahan Dasri (N=15)

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{68}{1 + \left(\frac{68}{15} \right)} \\
 &= 11,18 = \text{dibulatkan } 13 \\
 n''' &= 13 \times 0,191 \\
 &= 2,49 = \text{dibulatkan } 3
 \end{aligned}
 \quad \left| \quad
 \begin{aligned}
 deff &= \frac{0,0037}{\frac{(0,50 \times 0,50)}{13}} \\
 &= 0,191
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terpilih unit sampel ke-III yaitu 3 TPS dari Kelurahan Dasri, 1 TPS dari Kelurahan Parangharjo, 3 TPS dari Kelurahan Alasrejo dan 3 TPS dari Kelurahan Bengkak. Kemudian dilakukan acak sederhana untuk penentuan TPS dari tiap kelurahan menggunakan aplikasi *Excel* dengan rumus *VLOOKUP*, sehingga terpilih TPS 3,8, dan 10 di Kelurahan Dasri; TPS 4 di Kelurahan Parangharjo; TPS 7, 8, dan 11 di Kelurahan Alasrejo; serta TPS 3, 6, dan 11 di Kelurahan Bengkak.

Rumus perhitungan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi *error* (10% atau 0,10)

$$n = \frac{1.304.909}{1 + (1.304.909 \times 0,10 \times 0,10)}$$

$$\frac{1.304.909}{1 + 13049,09}$$

$$n = \frac{1.304.909}{13.050,09}$$

$$n = 99,99$$

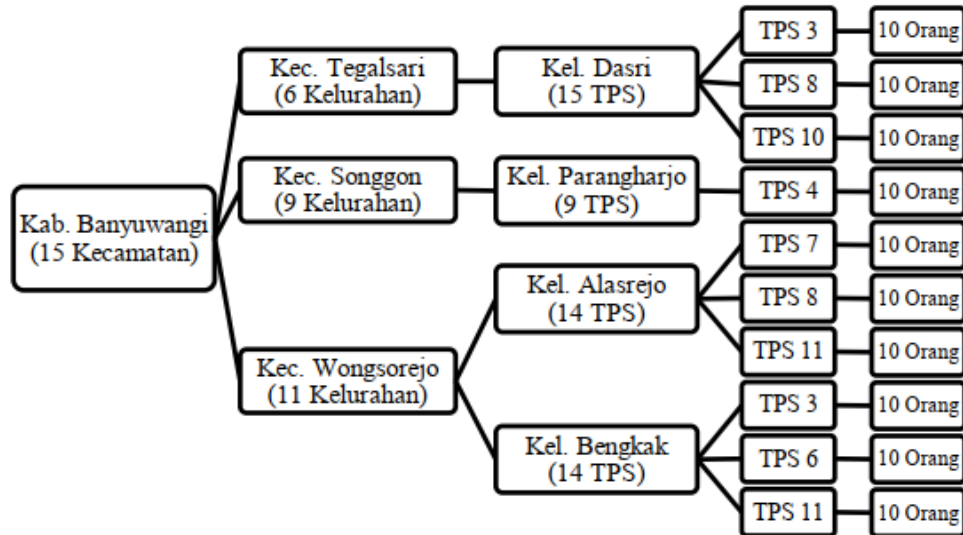
$$n = 99,99$$

$$n = 99,99$$

Berdasarkan rumus Slovin, maka diperoleh hasil sampel sebanyak 99,99 dan dibulatkan menjadi 100 sampel. Dengan demikian pada penelitian mengenai “Faktor Keterpilihan Ipuk Fiestiandani dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020” ini untuk mewakili seluruh populasi yang ada responden yang dibutuhkan yaitu 100 responden. Setelah jumlah sampel diketahui, langkah selanjutnya adalah memilih jumlah sampel masing-masing 10 responden dari unit TPS sampel terpilih:

Gambar 1.1

**Pengambilan sampel Acak Berdasarkan Area Sampling
(Cluster Random Sampling)**



Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2021

Dari data di atas ditambahkan sebanyak sepuluh responden untuk mengantisipasi adanya kerusakan pada kuesioner atau tidak dijawab dengan lengkap oleh responden, sehingga jumlah total sebanyak 110 (seratus sepuluh) responden.

1.9.4.1. Identitas Responden

Identitas responden yang disajikan dalam penelitian ini adalah identitas yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. Responden yang terdapat pada penelitian ini adalah responden dari masyarakat desa Bengkak, Alasrejo Kecamatan Wongsorejo, desa Parangharjo Kecamatan Songgon, dan desa Dasri Kecamatan Tegalsari, yang berjumlah 100 (seratus) orang . Kecamatan

Songgon, dan desa Dasri Kecamatan Tegalsari, yang berjumlah 100 (seratus) orang .

Tabel 1.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase (%)
Laki-Laki	45	45
Perempuan	55	55
Total	100	100

Sumber : Data Primer yang diolah Peneliti, 2021

Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan pada penelitian ini terdiri dari 45 orang berjenis kelamin laki-laki dan responden yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 55 orang.

Tabel 1.3
Usia Responden

Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Presentase (%)
18 – 16	10	10
17 – 35	18	18
36 – 44	13	13
45 – 53	35	35
54 – 61	16	16
63 – 71	6	6
71 – 80	1	1
81 – 89	1	1
Total	100	100

Sumber: Data Primer yang diolah Peneliti, 2021

Responden paling banyak pada penelitian ini berada di kategori umur 45-53 lebih dengan jumlah 35 orang. Kemudian responden dengan umur 17-35 tahun berjumlah 18 orang, umur 54-61 tahun berjumlah 16 orang, umur 36 - 44 tahun berjumlah 13 orang, umur 18-16 tahun berjumlah 10 orang, umur 63 – 71 tahun berjumlah 6 orang, umur 71-80 tahun berjumlah 1 orang, dan umur 81-89 berjumlah 1 orang .

Tabel 1.4
Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
Petani	54	54
Wiraswasta	17	17
Pelajar/ Mahasiswa	4	4
Ibu Rumah Tangga	14	14
Lainya	1	1
Total	100	100

Data Primer diolah oleh Peneliti, 2021

Responden yang menjadi Petani dengan jumlah 54 orang menjadi yang paling banyak pada penelitian ini. Sementara, responden Lainnya adalah yang paling sedikit sejumlah 1 orang. Sebanyak 17 orang adalah wiraswasta, 14 orang adalah Ibu Rumah Tangga, 4 orang adalah Pelajar/ Mahasiswa.

Tabel 1.5
Tingkat Pendapatan Responden

Pendapatan/bulan (Rp)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
0 – Rp 578.569,71	18	18
Rp 578.569,71 – Rp 1.157.139,44	67	67
Rp 1.157.139,44 – Rp 1.314.178,87	15	15
Total	100	100

Data Primer diolah oleh Peneliti, 2021

Pada penelitian ini responden mayoritas memiliki Pendapatan/bulan yaitu Rp 578.569,71 – Rp 1.157.139,44 berjumlah 67. Responden dengan Pendapatan/ Bulan paling sedikit yaitu Rp 1.157.139,44 – Rp 1.314.178,87 berjumlah 15 orang. Sementara Lainnya, Pendapatan Per/Bulan yaitu 0 – Rp 578.569,71 berjumlah 18 orang.

Tabel 1.6
Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Tidak/Belum Sekolah	4	4
SD/Sederajat	36	36
SMP/Sederajat	35	35
SMA/Sederajat	19	19
DIII/S1	6	6
Total	100	100

Data Primer diolah oleh Peneliti, 2021

Pada penelitian ini responden mayoritas memiliki jenjang pendidikan SD dengan jumlah 36 orang. Responden dengan jenjang pendidikan Tidak / Belum Sekolah paling sedikit sejumlah 4 orang. Sementara lainnya, sebanyak 35 orang memiliki jenjang pendidikan SMP, sebanyak 19 orang memiliki dengan jenjang pendidikan SMA, dan sebanyak 6 orang memiliki jenjang DIII/S1.

1.9.5. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini berupa teks, kata-kata tertulis frasa-frasa yang menggambarkan orang-orang, tindakan-tindakan angka dan peristiwa-peristiwa. Menurut (Arikunto, 1006) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor terpenting dalam penelitian, berdasarkan masalah penelitian, data digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan dan pengambilan data dan berhubungan langsung dengan subjek sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, data primer diambil dari data wawancara informan, observasi dan dokumentasi dari Informan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu subyek penelitian baik oleh pihak ketiga maupun secara tidak langsung, oleh seorang peneliti. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia yang diperoleh dari otoritas pihak yang berwenang.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

Pertama , wawancara mendalam . Teknik wawancara dilakukan secara mendalam dan sistematis dengan tujuan agar informasi yang diperoleh lebih detail sehingga arah wawancara lebih pada fokus kajian. Melalui wawancara mendalam akan menemukan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada Bupati terpilih (Ipuk Fiestiandani) Tim Sukses Ipuk Fiestiandani, Pengurus partai PDIP, Pengurus partai PPP, Pengurus partai Hanura, Pengurus partai Gerindra, dan Tiga partai Non Parlemen (PAN, Berkarya, PSI) dan Tokoh Masyarakat.

Kedua, observasi, observasi sebagai teknik perolehan data yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan teknik lainya. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi/lapangan. Observasi juga dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang didukung oleh wawancara dan kuesioner analisis . Observasi dilakukan dengan Kepala Daerah terpilih , Partai Pengusung, dan orang-orang yang mempengaruhi kemenangan Ipuk –Sugirah (Tim Pemenangan)

Ketiga, dokumentasi , dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Burhan Bungin, 1007) Dokumentasi yang digunakan meliputi dokumen biografi kekerabatan oligarki, serta orang-orang yang berpengaruh dalam kemenangan, dokumen perolehan suara kandidat Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, dokumen data pemilih tetap, data suara tertinggi, sedang, dan terendah masing-masing dapil.

2. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif

Metode survey menghasilkan gambaran suatu populasi dengan mempelajari sampel, untuk dapat digeneralisasikan sebagai sikap keputusan suatu populasi tersebut . Langkah survey yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner. Penyebaran survey dengan cara kuesioner ini dilakukan kepada masyarakat kecamatan dengan kualifikasi suara tertinggi, sedang, dan terendah (Tegalsari, Songgon, Wongsorejo) dan tercatat memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2020.

Pilkada Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu pelaksanaan politik tingkat daerah yang diwarnai adanya keterikatan oligarki di dalamnya yang mendorong adanya kekerabatan, faktor ini akan diulas lebih dalam oleh peneliti mengenai kemunculan oligarki yang tidak selalu berasal dari penguasaan ekonomi semata namun hasil dari transformasi yang ingin dilanjutkan kembali . Hal ini menjadikan masyarakat sebagai indikator utama yang dapat dihubungkan dengan pihak-pihak yang diteliti, terutama untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya

1.9.7. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua proses metode analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif .

1. Analisis Data kualitatif

Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode yang diterapkan oleh Miles Huberman yang dikutip dalam (Raco, 2010) terdiri atas 3 (tiga) tahapan : (a) *Data Reduction* (reduksi data), dilakukan dengan cara memilih data pokok untuk difokuskan pada data penting, sehingga terlihat gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya, (b) *Data display* (penyajian data), memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus dan sebagai acuan untuk menganalisis data dengan menyajikan bagan. (c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang disajikan dalam deskriptif dengan berpedoman pada kajian penelitian.

2. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif statistic deskriptif. Kegiatan analisis data dimulai dari : (a) Pengolahan data, dilakukan dengan cara pengeditan data , coding, dan transformasi data. (b) Penyajian data, dilakukan dalam bentuk tabel daerah pilihan untuk mengetahui daerah dengan suara terbanyak, seda sedang, dan terendah untuk dapat memberikan data faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihanya. (c) Analisis data, dilakukan dengan cara analisis statistic deskriptif. Jadi penulis mengungkapkan dan mendeskripsikan persepsi masyarakat dalam memahami fenomena Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 .

1.9.8 Kualitas Data

Data yang digunakan penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan , observasi, kuesioner serta dokumentasi . Keseluruhan dan bersamaan dengan data sekunder dianalisis , sehingga menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

